

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap lembaga pemerintahan diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangannya berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pada Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa SAP mengakui pendapatan, beban, harta, liabilitas, dan ekuitas dalam laporan keuangan berbasis akrual, serta pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBN/APBD. Laporan keuangan tersebut menjadi sarana pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada masyarakat (Kartoprawiro & Susanto, 2018). Tuntutan masyarakat mengenai transparansi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, membuat pemerintah harus menerbitkan laporan keuangan yang berkualitas (Rahayu & Fidiana, 2018). Setiap tahunnya, laporan keuangan tersebut diperiksa dan mendapatkan penilaian berupa Opini dari BPK. Dengan diauditnya suatu laporan keuangan, maka laporan tersebut dapat dipercaya atas kewajarannya bagi yang bersangkutan dengan Laporan keuangan terkait. Auditor yang independen dibutuhkan untuk menjamin bahwa laporan keuangan terkait memang relevan dan reliabel untuk meningkatkan kepercayaan publik (Hamid, 2019).

Maka dari itu, kepercayaan dari pihak yang bersangkutan dengan laporan keuangan yang telah diaudit inilah yang memaksa mereka untuk memperhatikan kualitas auditnya. Kualitas audit mencerminkan keahlian auditor untuk mendeteksi dan melaporkan permasalahan pada sistem akuntansi *auditee*. Kemungkinan ditemukannya pelanggaran tersebut, dapat dilihat dari keterampilan praktik auditor, sementara untuk adanya kemungkinan pelaporan pelanggaran dapat dilihat dari independensi dan integritas auditor itu sendiri (Ariany, 2017).

Agar kualitas audit dapat mendukung keberhasilannya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan kinerja auditor yang berkualitas pula (Janvrin et al., 2008). Auditor dituntut harus terus mengembangkan pengetahuan dan

kemampuannya seiring berkembangnya zaman, yang menyebabkan beban auditor menjadi bertambah. (Ramazani et al., 2012). Totok (2011) mengatakan bahwa dengan adanya sarana teknologi dan informasi, informasi yang disajikan oleh auditor menjadi lebih cepat, tepat, dan kredibel (Uyar et al., 2015).

Di era digitalisasi ini, perkembangan teknologi dan informasi kian melesat, berbagai inovasi dilakukan untuk memudahkan sebuah pekerjaan atau aktivitas. Terlebih pada masa pandemi *Covid-19*, berbagai kebijakan dibuat di beberapa negara seperti Indonesia yang mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut berdampak pada kegiatan sehari-hari yang menjadi terbatas, begitupun dengan kegiatan audit, para auditor memiliki tantangan dalam menjalankan tugasnya, seperti akses ke orang atau informasi, merevisi kembali hasil penilaian, dan mengubah prosedur-prosedur audit dengan alternatif dalam kondisi pembatasan fisik akibat PSBB. Maka perkembangan teknologi dan informasi sangat diperlukan (Satyawan et al., 2021).

Perkembangan teknologi dan informasi sendiri memiliki beberapa dampak yang positif untuk kemajuan peradaban. Salah satu dampak utama perkembangan teknologi dan informasi adalah tersedianya data dan informasi melalui teknologi internet. Data yang ada pada era saat ini sangatlah membludak, membludaknya data tersebut menyebabkan lahirnya era *Big Data*. Dengan data yang bervolume besar, bervariasi, kompleksitas tinggi, dan percepatan pertumbuhan data yang signifikan, *big data* memberikan nilai positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia bisnis (Sivarajah et al., 2017).

Data memegang peranan penting dalam pencetusan keputusan yang strategis. Sehingga, pihak-pihak yang dapat memproses dan memanfaatkan data-data yang membludak pada era *Big Data* ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar, seperti kemudahan penyimpanan data yang dapat ditemukan dalam berbagai macam format, efisiensi biaya, dan efektivitas waktu (Ahmad & Aliyudin, 2020). Di Indonesia implementasi *Big Data* belum terlalu populer, sebagian besar diterapkan di sektor swasta untuk tujuan bisnis, lain halnya dalam sektor publik, implementasi *Big Data* diterapkan untuk pelayanan masyarakat, salah satunya di Kota Bandung. Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Bandung

membangun *Digital Command Center* yang digunakan untuk menyebarkan informasi di Kota Bandung (Ahmad & Aliyudin, 2020). Penerapan *Big Data* dapat dilihat dari kemampuan Infrastrukturnya IT yang ada, sehingga pekerjaan dapat dijalankan dengan sebuah aplikasi dan *Big Data Analytics*. Selain digunakan dalam kegiatan bisnis dalam sektor swasta, maupun untuk pelayanan masyarakat dalam sektor publik, *Big Data juga* digunakan dalam bidang audit (Adrianto, 2018).

Per tanggal 15 November 2017, BPK meluncurkan sebuah aplikasi bernama SIAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan) sebagai penunjang audit pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017. SIAP adalah sebuah sistem aplikasi yang berguna seperti *tools* yang dapat meringankan berbagai tugas audit dengan efisien, sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sering muncul dalam audit. Melalui aplikasi SIAP ini diharapkan BPK dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik dengan menerapkan sistem yang unggul dengan sokongan teknologi (BPK RI, 2017).

Per tanggal 7 Desember 2020, Ketua BPK memperkenalkan Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 yaitu BPK mesti memanfaatkan teknologi digital dan *big data* secara bertahap dalam pemeriksaan keuangan negara. Implementasi *big data analytics* diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas analisis data yang sangat besar, variatif, dan tidak diam. Pendekatan *Big Data Analytics* didukung oleh Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SIAP) dan Portal Covid. Dalam pelaksanaan penerapan *Big Data Analytics* atas penanganan pandemi Covid-19, kegunaan *Big Data Analytics* dirasa masih belum bisa dimaksimalkan, sehingga perlu perkembangan secara intensif (BPK RI, 2020).

Dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan (IBIK) Bogor, Pinky Dezar Zulkarnain yang merupakan Head of BPK's Big Data Analytics Lab. yang menjadi narasumber di webinar tersebut mengatakan bahwa dalam pengembangan *Big Data Analytics* masih terdapat *interesting question*, seperti adanya perbedaan pada data rujukan (*Master Data*), sebagai contoh digunakan *master data* kode wilayah, dalam Kemendagri kode wilayah Kota Bogor yaitu 3104, sedangkan dalam Kemenkeu 2473.

Sehingga akan ada proses algoritma dengan dua metode yaitu melalui kadar kemiripan dan kebersamaan asosiasi.

Dalam proses penyampaian data kepada auditor, awalnya auditor tidak perlu belajar SQL untuk mengakses *database*, auditor dapat melakukan permintaan data yang nantinya akan diproses oleh tim lab. Namun, tim lab menjadi kebanjiran permintaan, sehingga diperlukan *bootcamp* antara auditor dan tim lab, yang diharapkan auditor dapat mempelajari *BIDICS* tersebut.

Pada tanggal 6 Desember 2021, BPK telah mengumumkan adanya pengembangan *data analytics* pada workshop yang membahas mengenai penggunaan *Big Data Analytics* (BIDICS) dari yang sebelumnya *Data Centric*, dengan pengumpulan data terlebih dahulu yang dijadikan fokus, kini beralih ke arah yang lebih luas menjadi *Analytics Centric*, dengan model *analytics* sebagai fokus yang dibutuhkan oleh auditor, penunjang, dan manajemen BPK. Hasil-hasil *analytics* yang diperoleh nantinya akan menjadi bagian utama dalam merealisasikan *data literacy* dan *data culture* di BPK. Nantinya, BIDICS digunakan sebagai alat bantu pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD, serta pemeriksaan strategis (BPK RI, 2021).

Pada tanggal 4 Februari 2022, BPK menggunakan perencanaan audit berbasis risiko dan menggunakan *Big Data Analytics* pada BIDICS untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2021. Pemanfaatan perencanaan berbasis risiko digunakan dalam menyusun opini audit, auditor melakukan evaluasi dan pengujian terperinci atas beberapa akun yang berisiko untuk memperoleh kepercayaan tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Di sisi lain, aplikasi BIDICS dimanfaatkan untuk mengenali bermacam-macam data dan tanda-tanda adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan barang dan jasa. Terbukti Kemenlu mampu melebihi target realisasi PNPB hingga 112,02% dan merealisasikan belanja hingga 95,74% pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 (BPK RI, 2022).

Dalam penelitian Ahmad & Aliyudin (2020) implementasi *Big Data* memiliki pengaruh positif terhadap keefektivitasan audit dalam pemerintahan di Kantor Inspektorat Kabupaten Majalengka. Keefektivitasan tersebut dinilai melalui indikator efisiensi, efektivitas anggaran, dan ekonomis. Dimana nilai berada pada kisaran 68-84% dengan kategori tinggi. Lalu, dalam penelitian Tunggal & Elliza (2021) didapatkan bahwa *Big Data Analytics* memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya *audit delay*. Sehingga dapat dijelaskan bahwa potensi *audit delay* dapat diturunkan dengan semakin tingginya implementasi terhadap *Big Data Analytics*. Ini menunjukkan bahwa implementasi *Big Data Analytics* dapat dijadikan pertimbangan bagi auditor karena terkait dengan kompleksitasnya.

Sementara itu, penelitian mengenai *Big Data Analytics*, terlebih di sektor publik Indonesia masih terbilang sedikit. Pengembangan *BIDICS* di BPK yang masih sangat baru, memiliki efek yang sangat menjanjikan dalam dunia audit terlebih dalam sektor publik Indonesia di masa depan, banyak sekali manfaat yang didapat seperti efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dan analisis data pemerintahan di Indonesia yang sangat banyak. Maka dari itu peneliti ingin berkontribusi dalam memperluas literatur dengan menguji pengaruh pengimplementasian *Big Data Analytics* terhadap kualitas audit pada BPK RI, dengan mengaplikasikan TAM (*Technology Acceptance Model*) sebagai landasan teori dimana menurut teori ini pengaruh utama dari penerimaan teknologi dilihat dari sisi persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*).

## 1.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah persepsi manfaat (*perceived usefulness*) auditor BPK RI dalam implementasi *Big Data Analytics* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) auditor BPK RI dalam implementasi *Big Data Analytics* berpengaruh terhadap kualitas audit?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang telah dibuat, dapat dijabarkan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat (*perceived usefulness*) auditor BPK RI dalam implementasi *Big Data Analytics* terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) auditor BPK RI dalam implementasi *Big Data Analytics* terhadap kualitas audit.

### 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi andil pada pengembangan teori dan pengetahuan mengenai persepsi auditor dalam implementasi *Big Data Analytics* terhadap kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur akuntansi mengenai perkembangan *Big Data Analytics* terhadap kualitas audit dalam persepsi kemudahan serta manfaat yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan implementasi *Big Data Analytics* kedepannya.